

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu keamanan nasional mengambil posisi yang penting dalam kajian hubungan internasional. Rumusan keamanan nasional menjadi identik dengan praktik kepentingan nasional dan menjadi isu yang mapan dalam wacana politik hubungan internasional untuk menunjukkan tujuan kebijakan yang dapat dibedakan dari kebijakan lainnya (Wolfers, 1962 dalam Hughes & Lai, 2011). Sebagai salah satu bentuk dari kepentingan nasional, keamanan nasional mempunyai banyak kesamaan dengan kekuasaan dan kekayaan yang menjadi penting bagi urusan internasional dan menjadi cara sebuah negara untuk mengontrol tindakan orang lain secara objektif, dan mengukur ketiadaan ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh (Wolfers, 1962 dalam Hughes & Lai, 2011). Keamanan nasional menjadi penting karena negara-negara mendominasi banyak kondisi yang memengaruhi keamanan di tingkat individu dan internasional, serta negara-negara tampaknya tidak dapat hidup berdampingan secara harmonis (Buzan, 1991 dalam Hughes & Lai, 2011). Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri pula jika keamanan menjadi masalah yang cukup vital baik di tingkat individu, nasional, atau pun internasional. Selain fakta bahwa keamanan nasional merupakan isu yang vital, isu keamanan nasional menjadi menarik pula untuk dikaji karena adanya evolusi dari ancaman keamanan yang bersifat tradisional menuju ancaman-ancaman non-tradisional yang memperluas dimensi dan aspek-aspek yang dapat dipersepsikan sebagai ancaman.

Salah satu kasus aktual yang dapat menjadi contoh adalah invasi skala penuh Rusia-Ukraina pada Juni tahun 2022. Konflik ini dimulai di saat Rusia menurunkan pasukan dan persenjataan militernya di sepanjang perbatasan Rusia pada tahun 2021 dan terus mengirimkan pasukannya ke Krimea dan Belarus pada bulan selanjutnya. Rusia menuntut penahanan ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebagai janji Amerika Serikat pada akhir masa Perang Dingin dan menuntut Ukraina untuk tidak menerima perlindungan dari NATO (Qaisrani et al.,

2023). Tuntutan Kremlin ini tidak diindahkan Kyiv yang kemudian direspon Putin dengan menyatakan dan mengakui proklamasi kemerdekaan dua wilayah Ukraina yaitu Donetsk dan Luhansk serta memerintahkan pasukan militer Rusia di Ukraina untuk melakukan pekerjaan “Penjagaan Perdamaian” di sana (Qaisrani et al., 2023). Respon militer yang diberikan Putin ini kemudian terus berjalan hingga saat ini yang kemudian dikenal dengan invasi skala penuh Rusia ke Ukraina.

Selain melibatkan kekuatan militer, invasi skala penuh ini juga turut melibatkan faktor keagamaan terkhusus agama Kristen Ortodoks Timur yang populasi pemeluk agama ini cukup banyak di masing-masing negara. Dari sisi Rusia, Patriark Kiril sebagai pemimpin dari Gereja Ortodoks Rusia (ROC) mendukung, memberkati, dan membenarkan agenda politik Rusia terhadap Ukraina dengan membingkai invasi Rusia ke Ukraina sebagai perang suci dan menjadi bentuk perlawanan terhadap Barat dan nilai-nilai non-Kristianinya (Coman, 2023). Di sisi Ukraina, Gereja Ortodoks Ukraina (OCU) dan pemimpinnya, Metropolitan Epiphanius telah mengambil posisi tanpa kompromi terhadap agresi yang dilakukan. Banyaknya situs Gereja Ortodoks yang dihancurkan, pendeta yang diculik, diancam dan dicari menegaskan pandangan mereka terhadap konflik ini dan terus berdoa untuk kemenangan Ukraina (Palinchak & Bokoch, 2023). Gereja Ortodoks Ukraina dengan tegas menyebutkan tanda-tanda genosida dan pembunuhan yang akhirnya mengubah pemahaman bahwa tidak berdosa untuk melakukan pembunuhan untuk memertahankan tanah air (Palinchak & Bokoch, 2023). Di samping itu Metropolitan Ephipanius juga menegaskan dalam suratnya yang menyebutkan jika semangat anti-kristus bekerja dalam Putin sehingga hal ini tidak hanya membahayakan kondisi Ukraina melainkan kondisi dunia secara keseluruhan. Pernyataan ini lalu ditegaskan kembali oleh Uskup Agung Yevstratiy Zoria selaku juru bicara OCU yang menyebut Putin bukanlah Mesias melainkan anti-kristus karena tindakan-tindakannya berlawanan dengan injil dan menentang Tuhan (Hotchkiss, 2023).

Berkaitan dengan kondisi perang dan partisipasi Ortodoksi Timur di dalamnya, komunitas Gereja Ortodoks Ukraina – Patriarkat Moskow (UOC-MP) juga menjadi komunitas yang krusial untuk dianalisis. Sebagai salah satu komunitas

keagamaan yang terkemuka dan memiliki pengaruh yang cukup luas di Ukraina, keberadaan UOC-MP penting untuk diketahui untuk dapat memahami kasus secara keseluruhan. UOC-MP terbentuk pada tahun tanggal 25-27 Oktober 1990 atas dasar eksarkat Ukraina dari Patriarkat Moskow yang sudah ada sebelumnya. Di dalam pembentukannya, UOC-MP mengadopsi Statuta Administrasi Gereja yang disetujui dan diakui oleh Patriarkat Moskow sebagai Gereja yang “memerintah sendiri” dalam konteks manajerial dan struktural sehingga UOC-MP tetap dalam kesatuan dengan ROC (Richters, 2013). Oleh karena itu, UOC-MP mengakui ROC sebagai induk Gerejaanya dan UOC-MP sendiri sudah menjadi bagian dari institusi negara sejak abad ke-17 hingga sekarang. Sebagai salah satu Gereja Ortodoks terkemuka di Ukraina, UOC-MP memiliki komunitas yang luas, jejaring politik yang kuat, dan sumber daya manusia dan materi yang signifikan, sehingga ia memiliki pengaruh yang cukup besar dalam struktur sosial di Ukraina (Richters, 2013).

Akan tetapi dalam perkembangannya UOC-MP mulai mendapat kritik dan sorotan karena dalam beberapa peristiwa sejarah Ukraina yang melibatkan partisipasi Rusia seperti Euromaidan, Aneksasi Krimea, dan krisis di Donbas, UOC-MP terkesan tidak dapat mengakomodasi kemarahan rakyat dan terkesan inkonsisten dalam merespon peristiwa yang sedang terjadi. Sebagai contoh, pada peristiwa Euromaidan tahun 2013 sebagian besar pendeta UOC-MP yang pro-Rusia menunjukkan ketidaknyamanannya dengan gerakan ini. Meski UOC-MP mengambil sikap untuk netral, tetapi UOC-MP dicap resisten dan tidak partisipatif dalam gerakan tersebut (Hudson, 2018). Begitu juga pasca Euromaidan sekitar tahun 2014, terjadi pendudukan gedung-gedung administrasi oleh kelompok anti-Kyiv di Timur, dan lagi-lagi UOC-MP dianggap tidak dapat memahami kemarahan rakyat, tidak seperti Gereja lain di Ukraina yang vokal menyampaikan perlawanannya. UOC-MP juga menyebut krisis tersebut sebagai “perang sipil”, “pembunuhan saudara” dan sebutan lainnya yang mengisyaratkan konflik ini sebagai isu internal (Artymyshyn, 2022). Pada aneksasi Krimea UOC-MP juga dianggap dikontrol penuh oleh Rusia dan pendetanya dituduh menjadi penyebar propaganda pro-Rusia, separatistis dan tuduhan-tuduhan serupa lainnya (Shestopalets,

2019). Di samping itu, dalam beberapa konflik di pasca peristiwa krusial ini seperti kasus di Donbas, mereka menyebutkan jika krisis tersebut bukan perjuangan melindungi kemerdekaan dan kedaulatan melainkan pembelaan terhadap “Ortodoksi Kanonik”.

Tidak terkecuali dalam peristiwa invasi skala penuh Rusia ke Ukraina tahun 2022. Sejak Rusia memulai invasinya ke Ukraina, sejak saat itu pula sorotan tajam ditujukan kepada UOC-MP. Banyak dari mereka yang mengkritisi UOC-MP karena seolah mendukung tindakan-tindakan Rusia alih-alih mendukung Ukraina dalam invasi ini. Menanggapi hal ini, UOC-MP mengambil sikap dengan menyesalkan terjadinya peristiwa ini dan menyerukan adanya proses untuk mencapai perdamaian (Giangravé & Jenkins, 2022). Pemimpin UOC-MP, Metropolitan Onufriy juga menyebut peristiwa ini sebagai bencana. Lebih khusus, UOC-MP dalam Sinode Suci Gereja Ortodoks Ukraina pada 12 Mei 2024, menyerukan bagi pemerintahan Rusia dan Gereja Ortodoks Rusia untuk mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menghentikan krisis ini (Ukraine Orthodox Church, 2022a). UOC-MP bahkan “secara sepihak” melakukan amandemen terhadap statutenya dengan memutuskan hubungan dengan ROC di Moskow. Akan tetapi respon yang ditunjukkan oleh UOC-MP ini hanya bentuk formalitas semata karena mereka tetap mengacu pada Piagam Aleksey II pada tahun 1990 sebagai tindakan kanonik yang mendasari dan mendefinisikan statusnya.

Sikap UOC-MP selama proses agresi Rusia tidak terlepas dari doktrin Dunia Rusia yang digaungkan oleh pemerintah Rusia dan juga didukung oleh ROC. Secara singkat, doktrin ini menekankan pada kesatuan etnis Rusia secara keseluruhan, tidak hanya Rusia melainkan juga Ukraina dan Belarusia. Di dalam Gereja Ortodoks Rusia, pemahaman ini dimaknai kembali sebagai komunitas yang berdasarkan kepercayaan iman Ortodoks, kebudayaan dan bahasa Rusia, seperti memori sejarah yang sama dan sebuah model dari perkembangan sosio-ekonomi (Curanović & Leustean, 2015). Di dalam koneksinya dengan UOC-MP, UOC-MP terlibat dalam memperkenalkan pemikiran dogmatis ini dan sejak Desember 2017 atau saat amandemen terhadap statuta Patriarkat Moskow dilakukan, pendeta dari UOC-MP diwajibkan menurut statuta Gereja dan disiplin Gereja untuk menerapkan

doktrin Dunia Rusia di Ukraina sehingga para pendeta UOC-MP menyampaikan gagasan tersebut melalui khotbah dan kegiatan (Figurnyi et al., 2022; Ishchuk & Sagan, 2020). Doktrin ini secara aktif dimanifestasikan dalam agresi Rusia yang dimulai sejak tahun 2014.

Setidaknya eksistensi UOC-MP terlebih dalam beberapa tindakan agresi yang dilakukan Rusia sejak tahun 2014, kemudian mendorong tindakan delegitimasi terhadap UOC-MP. Delegitimasi dapat didefinisikan sebagai ketidakabsahan atau pembatalan sementara dalam bahasa Inggris, dijelaskan lebih detail jika delegitimasi berarti untuk mengurangi atau menghancurkan legitimasi, prestise, atau otoritas (Merriam Webster, n.d). Sejak agresi yang dilakukan pada tahun 2014, pemerintah Ukraina melakukan upaya delegitimasi terhadap UOC-MP, terlebih melalui langkah hukum seperti penerapan Undang-Undang No. 2662 tahun 2018 mengenai organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan negara agresor untuk menunjukkan afiliasinya dengan induk Gereja Rusia yang relevan di dalam namanya. Undang-undang ini dilatarbelakangi pendapat jika ada ancaman langsung untuk menyebarkan propaganda destruktif menggunakan faktor agama oleh negara agresor yang memiliki konsekuensi nyata terhadap kepentingan nasional, integritas teritorial, dan kesadaran nasional (Vasin, 2024). Di sisi lain, pada tahun 2019 Undang-Undang No. 2673 diadopsi untuk menyederhanakan prosedur perpindahan komunitas agama dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya (Vovk, 2020). Contoh lainnya adalah larangan terhadap akses UOC-MP dalam tentara Ukraina, karena bukti-bukti pengkhianatan tingkat tinggi dan kolaborasi di antara anggota UOC-MP dan hubungan mereka dengan otoritas pendudukan Rusia (Vasin, 2024).

Begitu juga sejak invasi skala penuh Rusia di mana muncul pola yang sama dengan sebelumnya ketika pola delegitimasi kembali berulang saat Rusia melakukan agresi militer terhadap Ukraina. Akan tetapi dalam invasi skala penuh Rusia saat ini menunjukkan tindakan delegitimasi yang berbeda dengan delegitimasi pada kasus sebelumnya yang lebih menekankan aspek hukum sebagai *output* dari delegitimasi yang dilakukan. Sepanjang invasi skala penuh Rusia tahun 2022 ini, telah banyak tindakan-tindakan pemerintah Ukraina yang seolah ditujukan untuk mendelegitimasi UOC-MP. Tindakan-tindakan pemerintah Ukraina seperti

pemindahan status administratif Kiev-Pechersk ke negara pengesahan, penggeledahan serta penangkapan pendeta pro-Rusia di Gereja ini, serta serangkaian tindakan lainnya yang ditujukan kepada UOC-MP menunjukkan upaya untuk mengurangi otoritas dan legitimasi yang mereka miliki (Khrystokin & Lozovytskyi, 2024, Tokman, 2023). Akan tetapi, tindakan yang ditujukan terhadap UOC-MP ini terkesan semakin signifikan seperti yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pendeta yang ditangkap yakni sekitar 68 orang dengan berbagai kasus yang disangkakan. Upaya terbaru yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina adalah pengadopsian Undang-Undang Nomor 3894 ‘Tentang Perlindungan Tatanan Konstitusional di Bidang Organisasi Keagamaan’. Undang-undang ini secara umum berisikan larangan bagi aktivitas Gereja Ortodoks Rusia di Ukraina dan juga mengatur hal-hal lain terutama pengaturan aktivitas organisasi yang berafiliasi dengan negara agresor. Pengadopsian instrumen hukum seperti ini secara konkret menunjukkan upaya pemerintah Ukraina untuk menghilangkan legitimasi atau mendelegitimasi UOC-MP sebagai komunitas keagamaan yang berafiliasi dengan negara agresor.

Dengan berkembangnya persepsi negatif terhadap UOC-MP berikut juga respons yang tergolong keras terhadap institusi tersebut maka terdapat urgensi untuk mengetahui proses pemerintahan Ukraina dalam melakukan tindakan delegitimasi yang ditujukan terhadap UOC-MP pasca invasi tahun 2022. Hal ini penting karena terdapat perbedaan pola delegitimasi yang dilakukan pemerintah Ukraina terhadap UOC-MP sebelum dan sesudah invasi skala penuh dilakukan. Pra invasi atau tepatnya sebelum tahun 2022, pemerintah Ukraina diketahui hanya melakukan upaya delegitimasi dalam hal pengadopsian Undang-Undang yang menekankan penyebutan afiliasi komunitas keagamaan yang berafiliasi dengan negara agresor dengan jelas, proses transisi dari satu yurisdiksi keagamaan ke yurisdiksi keagamaan lainnya yang dipermudah terlebih dengan kemunculan OCU yang mendapat dukungan dari pemerintah, serta larangan pendeta UOC-MP untuk terlibat dalam militer Ukraina (Vasin, 2024). Di sisi lain, pasca invasi pemerintah Ukraina cenderung menunjukkan tindakan yang lebih tegas dari pada yang sebelumnya seperti pengadopsian Undang-Undang no. 3894 tahun 2024,

penggeledahan Gereja, dan penahanan beberapa pendeta UOC-MP pro-Rusia. Hal ini menunjukkan kemudian menunjukkan urgensi untuk membedah proses terbangunnya konstruksi ancaman eksistensial yang disematkan kepada UOC-MP sampai pada tindakan-tindakan yang luar biasa tersebut dapat terjadi.

Di sisi lain, pemilihan Ukraina sebagai lokasi penelitian didasari atas alasan jika Ukraina menjadi salah satu negara yang menjadi pusat dari pertarungan geopolitik Rusia. Mulai dari Orange Maidan, Euromaidan, aneksasi Krimea, perang di Donbas, sampai pada invasi skala penuh Rusia ke Ukraina menunjukkan posisi vital Ukraina dalam kebijakan geopolitik Rusia. Sepanjang prosesnya ini, UOC-MP berjalan beriringan dengan ROC dan Rusia dan juga terkesan tidak berpihak pada Ukraina meskipun tidak semua dari komunitas UOC-MP melakukan demikian. Terlebih pada invasi skala penuh Rusia ke Ukraina belakangan ini dan keterlibatan UOC-MP juga di dalamnya dapat menguatkan signifikansi dipilihnya Ukraina sebagai lokasi penelitian. Pemilihan Ukraina sebagai lokasi penelitian dapat diperkuat juga dengan data jika Ukraina merupakan negara dalam urutan ke-2 dengan jumlah praktisioner Ortodoksi Timur dengan jumlah 27,8 juta orang di dunia (worldpopulationreview.com, n.d). Di Ukraina sendiri juga sebanyak 70% orang mengaku jika mereka Ortodoks dan 81% dari antara mereka yang mengaku Ortodoks memilih Gereja Ortodoks tertentu (Kyiv International Institute of Sociology, 2024a). Data ini menunjukkan jika Ortodoksi Timur memiliki penganut yang cukup banyak di Ukraina terlepas dari denominasinya¹ sehingga alasan-alasan ini mendukung mengapa Ukraina dipilih sebagai objek penelitian.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses delegitimasi yang dilakukan pemerintah Ukraina terhadap UOC-MP saat invasi skala penuh Rusia ke Ukraina tahun 2022-2024?"

¹ Denominasi adalah suatu kelompok keagamaan yang dapat diidentifikasi di bawah satu nama, struktur, dan/atau doktrin.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi Gereja Ortodoks Ukraina - Patriarkat Moskow dan perkembangannya hingga invasi skala penuh Rusia tahun 2022.

1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses delegitimasi yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina terhadap Gereja Ortodoks Ukraina – Patriarkat Moskow pasca invasi skala penuh Rusia tahun 2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Untuk memberi sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu hubungan internasional dengan menambahkan variasi dalam topik institusi agama dalam korelasinya dengan keamanan negara.
2. Untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya mengenai Gereja Ortodoks Ukraina dan proses delegitimasi yang ditujukan oleh pemerintah Ukraina terhadapnya.
3. Untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pembahasan institusi agama dan keamanan nasional secara khusus Gereja Ortodoks.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan wawasan pengetahuan mengenai proses delegitimasi yang dilakukan terhadap Gereja Ortodoks Ukraina di Ukraina. Wawasan tersebut dapat dipakai sebagai rujukan untuk mengatasi masalah serupa dan upaya meningkatkan kesadaran terhadap kejadian serupa.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa literatur akademik sebagai tinjauan pustaka. Literatur pertama berjudul *Church as an Existential Threat: The Securitization of Religion in Post-Euromaidan Ukraine* oleh Denys Shestopalets. Literatur ini mengulas dinamika proses sekuritisasi dan desekuritisasi UOC-MP di Ukraina sebagai ancaman eksistensial pada tahun 2014 atau pasca Euromaidan. UOC-MP dianggap sebagai *soft power* dari Rusia karena meski menyatakan loyal terhadap Ukraina, UOC-MP tetap dianggap bersimpati terhadap Kremlin pasca krisis Ukraina. Proses sekuritisasi terjadi lewat pengesahan Undang-Undang lewat Addendum 2662-VIII yang dapat dikatakan memiliki tujuan akhir untuk menetapkan status UOC-MP sebagai ancaman keamanan nasional. Selain itu, terdapat pula aktor-aktor kunci seperti Presiden, Perdana Menteri, dan Parlemen yang mengambil *speech act* sebagai bentuk sekuritisasi. Dari pihak UOC-MP juga melakukan desekuritisasi dengan menyatakan loyalitas ke Ukraina. Penelitian ini berargumen bahwa sekuritisasi yang terjadi bukan didasarkan atas kekhawatiran akan keamanan nasional, akan tetapi adanya kebutuhan mendesak untuk melegitimasi campur tangan negara dalam bidang agama dan penciptaan struktur keagamaan baru, Orthodox Church of Ukraine (OCU) (Shestopalets, 2020a).

Literatur kedua berjudul *Analysis of Public Media Discourses of the Main Actors of the Church Crisis in Ukraine* oleh Hennadii Khrystokin dan Vasyl Lozovytskyi. Literatur ini menunjukkan kemunculan narasi-narasi dari berbagai aktor terkait, terutama UOC-MP dan OCU. Selain itu, terdapat pula beberapa aktor-aktor lain yang menyebarkan diskursus-diskursus seperti Patriark Kiril sebagai Patriark dari Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Ekumenikal, pemerintah Ukraina, teolog di masing-masing Gereja, lembaga pemerintah, penegak hukum, dan partai politik, masyarakat sipil, dan masyarakat biasa Ukraina. Bentuk diskursus yang ditemukan acap kali berbentuk wacana teologis, politik, negara, dan media massa. Banyaknya aktor-aktor ini menciptakan narasi-narasi yang saling berbenturan antara pro dan kontra terhadap agresi yang dilakukan Rusia (Khrystokin & Lozovytskyi, 2024).

Literatur ketiga berjudul *Religious Freedom, Conspiracies, and Faith: The Geopolitics of Ukrainian Autocephaly* oleh Denys Shestopalets. Literatur ini menjelaskan internalisasi geopolitik dalam lanskap keagamaan Ukraina dengan pemberian *autocephaly* atau kemerdekaan terhadap Gereja Ortodoks Ukraina (OCU). Ukraina melegitimasi perlunya *autocephaly* Ukraina, atau untuk mengkompromikannya citranya di mata publik. Artikel ini berargumen bahwa peristiwa tahun 2018–2019 mengakibatkan meningkatnya geopolitisi perpecahan Ortodoks Ukraina dan bersamaan dengan itu instrumentalisasi gagasan kebebasan beragama sebagai alat perjuangan geopolitik baik pada tingkat diskursif maupun praktis (Shestopalets, 2020c).

Literatur keempat, berjudul *Information War in the Religious Sphere in the Context of the "Battle" For the Kyiv-Pechersk Lavra* oleh Bogdan Synchak, Yurii Yelisovenko dan Svitlana Romanchuk. Literatur berikut ini mengkaji aktivitas non-religius UOC-MP dalam konteks keterlibatannya dengan perang informasi di bidang agama. Hal ini berdasar dari tidak diperpanjangnya kontrak pengoperasian Kyiv-Pechersk Lavra sebagai situs agama UOC-MP. Dinas Keamanan Ukraina (SSU) melakukan penggeledahan di Lavra dan gereja-gereja UOC-MP di wilayah Rivne. Mereka menemukan adanya indikasi penyebaran propaganda Pro-Rusia dari “aktor berjubah” dari dalam situs tersebut yang mempertimbangkan pencabutan hak UOC-MP untuk menggunakan situs tersebut (Synchak et al., 2023).

Literatur terakhir berjudul *The National Identity and Orthodox Church: The Case of Contemporary Ukraine* oleh Dmytro Shevchuk, Kateryna Shevchuk, dan Kateryna Khudoba. Literatur ini mengulas pengaruh Ortodoks dalam pengembangan identitas nasional Ukraina modern. Para penulis menyebutkan jika terdapat faktor kekhususan nasional dalam agama Kristen terutama di negara-negara Eropa Timur dan Tengah yang terlibat dalam pembentukan kebudayaan nasional dan ciri-ciri nasional suatu komunitas tertentu. Dalam konteks Ukraina, perang yang dimulai Rusia pada tahun 2022 lalu berdampak signifikan terhadap proses sosial budaya, fungsi identitas nasional, dan situasi keagamaan khususnya Gereja Ortodoks. Penulis memerhatikan dampak tersebut dengan merujuk pada dokumen dan khotbah OCU sebagai upaya hierarkis Ortodoks dalam membangun

referensi identitas nasional. Di samping itu, penulis juga memerhatikan pengaruh ideologis yang coba diimplementasikan oleh umat dan Gereja UOC-MP sebagai wacana agama, politik, dan budaya yang dominan (Shevchuk et al., 2022).

Dari berbagai literatur yang menjadi tinjauan pustaka penulis sudah menyebutkan proses sekuritisasi lewat diskursus dan narasi yang telah disampaikan oleh tokoh-tokoh penting. Di sisi lain, beberapa dari mereka juga menghubungkannya dengan keamanan nasional. Namun, jika ditarik benang merahnya, pembahasan mengenai penelitian-penelitian yang menjadi tinjauan pustaka belum menggunakan atau mencantumkan *framework* sekuritisasi pada kerangka teori untuk menganalisis kasus. Hal ini dapat diperhitungkan sebagai kebaruan dalam penelitian ini. Di samping itu, hanya artikel yang berjudul *Church as an Existential Threat: The Securitization of Religion in Post-Euromaidan Ukraine* dari Denys Shestopalets yang menggunakan kerangka pemikiran sekuritisasi. Namun penelitian tersebut mengambil peristiwa Euromaidan di tahun 2014 hingga 2018 yang berbeda dengan kejadian invasi Rusia ke Ukraina yang terjadi pada tahun 2022 yang menunjukkan adanya celah waktu yang dapat diteliti sebagai kebaruan penelitian. Selain itu dengan menggunakan aspek doktrinal dari modifikasi kerangka sekuritisasi agama menurut Sheikh (2014) juga akan menguatkan penjelasan sekuritisasi yang juga menunjukkan aspek lain dari kebaruan penelitian.

1.5.1 Teori Sekuritisasi

Teori yang digunakan dalam menganalisis kasus ini adalah teori sekuritisasi dari Mazhab Kopenhagen yang merupakan bagian dari kerangka studi keamanan dalam tradisi konstruktivisme. Teori yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Jaap de Wilde, dan Ole Wæver ini dikembangkan pasca Perang Dingin yang memperluas definisi keamanan ke dalam ranah keamanan non-tradisional yang mendesak tetapi cukup terabaikan seperti perubahan lingkungan, kemiskinan dan hak asasi manusia ke dalam agenda keamanan negara (McDonald, 2013). Sebagai teori turunan dari konstruktivisme, Mazhab Kopenhagen berfokus pada bagaimana keamanan itu sendiri diberi makna dengan proses intersubjektif dan pada bagaimana dampak

politik yang ditimbulkan setelah keamanan tersebut dikonstruksi (McDonald, 2013). Proses intersubjektif ini mendorong pendefinisian dan kriteria sekuritisasi yang tepat. Keamanan sendiri merupakan langkah yang membawa politik melampaui aturan main yang ada dan membingkai isu tersebut sebagai jenis politik khusus atau sebagai politik yang hidup (Buzan, Wæver, dan De Wilde, 1998).

Wæver secara khusus menyebutkan beberapa aspek yang menjadi konsep sentral dari Mazhab Kopenhagen yang salah satunya merupakan sekuritisasi. Istilah sekuritisasi secara mendalam pertama kali diuraikan oleh Wæver pada tahun 1955 yang mengacu pada konstruksi ancaman yang sifatnya diskursif (McDonald, 2013). Sekuritisasi dapat dipandang sebagai versi politisasi yang lebih ekstrem (Buzan et al., 1998). Secara definisi sekuritisasi merupakan sebuah proses di mana seorang aktor menyatakan suatu isu, dinamika, atau aktor tertentu sebagai ‘ancaman eksistensial’ terhadap objek referensi tertentu. Jika kondisi ‘ancaman eksistensial’ ini diterima oleh khalayak yang relevan, maka penangguhan politik normal dan penggunaan tindakan darurat dalam menangani krisis yang dirasakan menjadi memungkinkan. Dalam hal ini keamanan menjadi media negosiasi antara pembicara dan khalayak dan sejauh mana keamanan dapat dikonstruksikan juga bergantung pada posisi otoritas dari pembicara dalam kelompok tertentu. Otoritas ini menurut Wæver juga bergantung pada kesuksesan sebuah sekuritisasi, di mana para elit yang memiliki otoritas cenderung berhasil dalam melakukan sekuritisasi (McDonald, 2013). Selain otoritas, kesuksesan sebuah sekuritisasi memiliki tiga komponen yaitu ancaman yang nyata, aksi darurat, dan efek pada hubungan antar unit dengan melanggar aturan (Buzan et al., 1998).

Mazhab Kopenhagen juga mengulas sektor sebagai salah satu konsep pemikirannya. Sebagaimana Mazhab Kopenhagen meluas ke ranah studi keamanan kepada aspek-aspek non-tradisional maka sektor juga dimaksudkan pula untuk aspek yang non-tradisional seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan politik. Buzan mengintegrasikannya ke dalam keamanan dan menghasilkan analisis untuk setiap aspeknya. Sektor ini digunakan untuk memilah keseluruhan untuk tujuan analisis dengan memilih beberapa pola interaksi yang khas, dan untuk mengurangi kompleksitas dan memfasilitasi analisis (Buzan et al., 1998).

Sekuritisasi memiliki ciri khusus yaitu struktur retorisnya yang spesifik yang bermaksud bahwa kelangsungan hidup, prioritas tindakan karena jika tidak ditangani segera maka keterlambatan yang ada membuat kita tidak dapat memperbaiki kegagalan kita (Buzan et al., 1998). Definisi ini menjadi panduan untuk menemukan aktor dan fenomena keamanan di sektor-sektor selain militer dan politik yang seringkali sulit untuk dimasukkan sebagai agenda keamanan. Terkadang sulit untuk menentukan sebuah isu sebagai agenda keamanan ketika isu-isu yang ada kerap dibatasi dengan ikatan keamanan tradisional, sehingga diperlukan gagasan yang jelas tentang kualitas penting dari keamanan secara umum (Buzan et al., 1998). Untuk memastikan kualitas tersebut diperlukan pementasan isu-isu eksistensial dalam politik untuk mengangkatnya di atas politik. Dengan wacana keamanan, suatu isu didramatisasi dan disajikan sebagai isu dengan prioritas tertinggi sehingga perlu untuk diperlakukan dengan luar biasa. Oleh karena itu, yang penting adalah bukan untuk menilai beberapa ancaman objektif yang benar-benar membahayakan suatu objek yang akan diamankan melainkan memahami proses pembangunan pemahaman bersama tentang apa yang harus dipertimbangkan dan ditanggapi secara kolektif sebagai ancaman (Buzan et al., 1998). Proses sekuritisasi dalam praktiknya kerap menggunakan media bahasa yang disebut juga sebagai *speech act*.

Artikulasi ancaman sendiri datang dalam bentuk *speech act*. *Speech act* dapat dipahami sebagai bentuk representasi yang tidak sekedar menggambarkan preferensi atau pandangan terhadap realitas eksternal. Menurut Wæver penggunaan bahasa keamanan dan ancaman, perwakilan negara memindahkan pembangunan tertentu ke wilayah tertentu, dan dengan mengklaim hak khusus untuk menggunakan cara apa pun yang diperlukan untuk menghalangi pembangunan tersebut (McDonald, 2013). Mazhab Kopenhagen sedari awal memosisikan *speech act* itu sendiri sebagai sekuritisasi, dan lebih lanjut disebut gerakan sekuritisasi dengan masalah yang disekuritisasi hanya jika dan ketika audiens menerimanya begitu saja. Penerimaan ini dikondisikan oleh adanya serangkaian kondisi yang memfasilitasi, termasuk bentuk *speech act*nya, kedudukan aktor sekuritisasi, dan kondisi secara historis yang dikaitkan dengan ancaman tersebut. Perlu diperhatikan

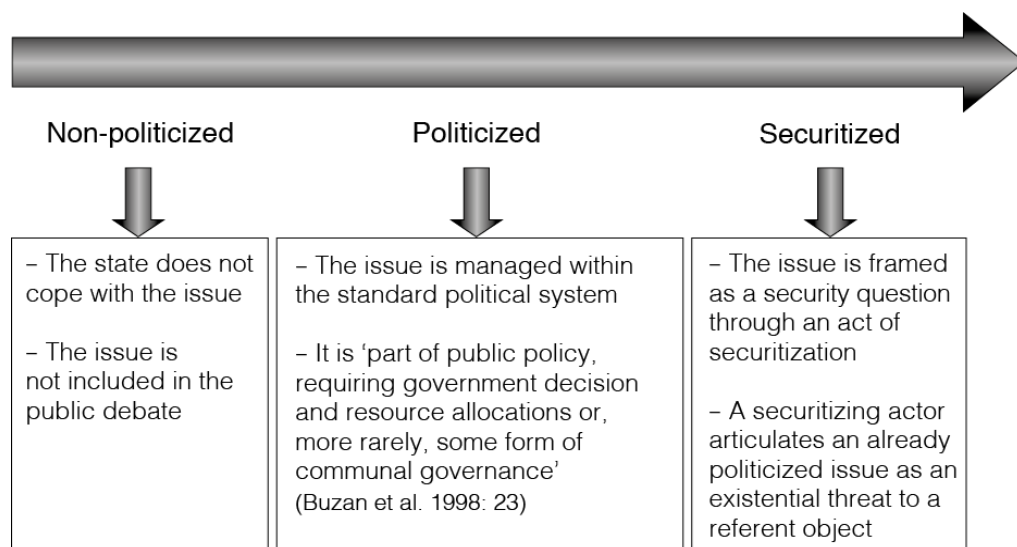
bahwa penggunaan *speech act* keamanan tidak diartikan dengan mengucapkan kata keamanan, karena yang penting adalah bagaimana *speech act* digunakan untuk menunjukkan sesuatu sebagai ancaman nyata yang memerlukan tindakan darurat atau tindakan khusus dan penerimaan penunjukan oleh khalayak yang signifikan (Buzan et al., 1998).

Pendekatan Mazhab Kopenhagen lewat *speech act* ini memerlukan pembedaan antara tiga unit yang terlibat dalam proses sekuritisasi yaitu, *referent object* (objek referensi), *securitizing actor* (aktor sekuritisasi), dan *functional actors* (aktor fungsional) (Buzan et al., 1998). Objek referensi merupakan suatu hal yang dipandang eksistensial mengancam dan memiliki klaim sah untuk bertahan hidup (Buzan et al., 1998). Objek referensi keamanan secara tradisional merupakan negara dan bagi negara kelangsungan hidup adalah kedaulatan dan bagi bangsa adalah soal identitas. Akan tetapi sesuai dengan pendekatan sekuritisasi, objek referensi dimungkinkan untuk mencakup berbagai pihak tanpa terkecuali sebagaimana aktor sekuritisasi dapat mengonstruksikan apa saja sebagai objek keamanan.

Aktor sekuritisasi adalah seseorang atau kelompok yang melakukan *speech act* keamanan (Buzan et al., 1998). Mereka yang menjadi aktor sekuritisasi biasanya mempunyai legitimasi seperti pemimpin politik, birokrasi, pemerintah, pelobi dan kelompok penekan. Aktor-aktor ini biasanya berargumen perlunya mempertahankan keamanan negara, bangsa, peradaban atau komunitas, prinsip, atau sistem lain yang lebih besar. Aktor fungsional merupakan aktor yang memengaruhi dinamika suatu sektor. Mereka bukan merupakan objek referensi atau aktor sekuritisasi tetapi secara signifikan memengaruhi keputusan di bidang keamanan (Buzan et al., 1998).

Dalam analisis sekuritisasi secara khusus Mazhab Kopenhagen menitikberatkan analisisnya dengan menetapkan spektrum isu-isu publik. Teori ini memulainya dari isu yang tidak dipolitisasi yang merupakan isu yang tidak ditangani oleh negara dan tidak merupakan isu yang tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan publik. Isu ini dipolitisasi yang artinya menjadikan isu tersebut menjadi isu publik dan memerlukan keputusan pemerintah dan alokasi

sumber daya. Lebih lanjut isu nya disekuritisasi yang menjadikan sebuah isu sebagai ancaman yang nyata, yang memerlukan tindakan darurat (segera) dan menjustifikasi aksi di luar batasan yang normal (Buzan et al., 1998). Secara sederhana, sekuritisasi bekerja dalam skema demikian dan menunjukkan adanya sebuah permasalahan yang dipindahkan dari yang dipolitisasi ke wilayah yang disekuritisasi melalui ‘tindakan sekuritisasi’.



Gambar 1.1 Proses Sekuritisasi

Sumber: Emmers, 2011: 134

Proses sekuritisasi setidaknya dapat dibedah menjadi dua tahapan. Tahap pertama berkaitan dengan penggambaran isu-isu tertentu dan tahap kedua berkaitan dengan keberhasilan sekuritisasi yang bergantung kepada penerimaan khalayak bahwa suatu objek referensi hadir sebagai ancaman eksistensial (Emmers, 2011 dalam Collins, 2013). Pada tahap pertama, keamanan disamakan dengan *speech act*, sedangkan sekuritisasi mengacu pada konstruksi ancaman eksistensial secara linguistik. Kondisi ini memerlukan peran konstituen untuk mengakui dan mendukung *speech act* yang dinyatakan agar sebuah *speech act* sebagai gerakan sekuritisasi dapat berubah menjadi sekuritisasi (Buzan et al., 1998). Hal ini selaras dengan konsep intersubjektivitas dalam memberikan makna dan kriteria keamanan.

Tahapan yang pertama ini juga dapat dikorelasikan antara proses sekuritisasi dengan keamanan nasional. Sebagai contoh, aktor negara atau non

negara dipersepsikan dan digambarkan sebagai ancaman yang eksistensial bagi keamanan negara atau keamanan internasional karena dianggap lebih penting daripada isu-isu lainnya (Emmers, 2011 dalam Collins, 2013). Penempatannya mungkin juga didramatisasi sehingga aktor sekuritisasi berhak untuk mengambil tindakan bahkan di luar batas politik normal. Dengan melakukan hal tersebut, proses intersubjektif (disebut juga praktik referensial) dari sebuah sekuritisasi menjadi terlihat jelas karena aktor-aktor sekuritisasi yang melempar diskursus keamanan lewat *speech act* bergantung pada khalayak yang menerima wacananya. Di sisi lain pada tahapan yang kedua, aktor-aktor sekuritisasi harus meyakinkan khalayak yang relevan jika objek referensi tertentu benar-benar menunjukkan ancaman besar, sehingga upaya-upaya di luar batas normal dapat dilakukan dan dapat ditoleransi oleh khalayak yang menerimanya (Emmers, 2011 dalam Collins, 2013). Oleh karena itu, sukses tidaknya sebuah wacana keamanan hanya ditentukan oleh khalayak yang menerimanya.

Di dalam penerimaan dan kesuksesan *speech act* terdapat *framework* baru yang diusulkan dari *Copenhagen School* yang disebut sebagai “*facilitating conditions*”. *Facilitating conditions* merupakan kondisi di mana *speech act* berhasil. Kondisi untuk menyebutkan jika *speech act* berhasil terbagi ke dalam dua kategori yaitu secara internal dan eksternal. Dari segi internal, linguistik-tata bahasa-untuk mengikuti aturan-aturan tindakan (atau, seperti yang dikatakan Austin, prosedur konvensional yang diterima harus ada, dan tindakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur ini). Dari segi eksternal, kontekstual dan sosial-untuk memiliki posisi dari mana tindakan tersebut dapat dilakukan (“Orang dan keadaan tertentu dalam kasus tertentu harus sesuai untuk pemanggilan prosedur tertentu yang diminta”). Singkatnya, untuk menilai apakah penerimaan *speech act* berlangsung sukses atau tidak - *facilitating conditions* dapat disimpulkan dalam tiga poin: (1) tuntutan internal terhadap tindak tutur untuk mengikuti tata bahasa keamanan, (2) kondisi sosial terkait posisi otoritas bagi aktor sekuritisasi-yaitu hubungan antara pembicara dan audiens dan dengan demikian kemungkinan audiens menerima klaim yang dibuat dalam upaya sekuritisasi, dan (3) fitur-fitur

dugaan ancaman yang dapat memfasilitasi atau menghambat sekuritisasi (Buzan et al., 1998).

Secara khusus Wæver (2000) menambahkan adanya variabel lain dalam poin 3 menguatkan *facilitating conditions* dalam proses sekuritisasi. Wæver menambahkan jika ada kondisi historis yang terkait dengan ancaman karena lebih mungkin bahwa seseorang dapat menyulap ancaman keamanan jika ada objek tertentu untuk merujuk yang umumnya dianggap mengancam, seperti misalkan tank, sentimen yang bermusuhan, atau perairan yang tercemar. Hal-hal ini tidak pernah membuat sekuritisasi yang diperlukan, tetapi mereka menyediakan kondisi yang memfasilitasi (Wæver dalam Kelstrup & Williams, 2000).

1.5.2 Kerangka Modifikasi Sekuritisasi di bidang Agama

Copenhagen School menjadi salah satu yang pertama dalam menawarkan teori eksplisit tentang agama melalui artikel edisi khusus Millennium pada tahun 2000 yang dengan eksplisit membahas demarkasi agama dalam studi keamanan, bahkan sebelum agama menjadi topik yang hangat dalam studi keamanan. Internalisasi agama dalam pendekatan teoretis ini membantu memperluas cakupan dari teori itu sendiri, yang sebelumnya dianggap terlalu sempit dan tidak fleksibel. Penjelasan mengenai sektor agama dalam teori ini juga membantu menganalisis isu-isu baru dalam studi keamanan sembari membuka pembahasan baru pada aktor-aktor non-negara yang juga dapat dipelajari sebagai politik keamanan. Pola yang digunakan juga tetap sama seperti teori sekuritisasi pada umumnya yang menunjukkan hubungan antara konstruksi keamanan secara eksistensial dengan menyampaikan narasi yang menarik urgensi dan tindakan darurat. Premis nya tetap sama, yakni kekerasan dimungkinkan oleh tindakan sekuritisasi yang sukses (Sheikh, 2014).

Akan tetapi, menurut Sheikh (2014) akuntansi sektor agama terlebih melalui artikel tersebut menimbulkan masalah yang belum selesai dalam konseptualisasi agama. Ia mengkritik konseptualisasi ini dengan dua argumen yakni, sektor keamanan yang cenderung mengadopsi konsep agama etno-sentris yang mengandalkan teologi/filosofi Barat dalam demarkasi wacana agama dan

diperlukannya alat analitis khusus terlepas dari kenyataan bahwa agama adalah konsep gabungan dengan relevansi lintas sektor. Pertama, artikel tersebut mendefinisikan iman sebagai elemen utama dari wacana agama yang mereka jelaskan jika sektor agama menunjukkan keunikan karena ia tidak membela identitas masyarakat, melainkan iman yang benar. Hal ini juga dirujuk oleh pemikiran Bataille yang menciptakan perbedaan antara transenden dan imanen, antara yang sakral dan profan. Hal ini membuat sektor keamanan yang cenderung mengadopsi pemikiran Barat yang dianggap hanya bersandar pada pemikiran Protestan dan Eropa, yang tidak dapat diaplikasikan secara universal karena penerapan pemikiran yang sakral-profan di Barat cenderung tidak dapat diterapkan pada agama-agama non-Barat seperti Buddhisme Zen dan Taoisme yang cenderung tidak menekankan dualisme tersebut. Hal tersebut juga berhubungan mengenai kritik Sheikh tentang penyangkalan kesenjangan antara yang transendental dan imanen. Ia mencontohkan interpretasi Sufistik yang alih-alih membedakan yang transendental dan imanen, mereka justru mempersatukan kesenjangan tersebut (Sheikh, 2014).

Posisi iman sebagai *referent object* juga dikritik Sheikh dalam tulisannya. Menurutnya, hal ini menjadi batasan analitis dan membuat teori tidak dapat menjangkau dimensi lain dari agama. Maksudnya adalah, penempatan iman sebagai satu-satunya objek referensi akan mengaburkan dimensi agama lain yang juga rentan disekuritisasi seperti, hukum, institusi, atau tempat suci. Pada saat inilah ia mengajukan dua pendekatan teoretis baru atas kritiknya untuk mengatasi kesenjangan teoretis. Pertama, ia menggunakan pendekatan Ninian Smart yang ia sebut sebagai pendekatan multidimensional yang berisikan tujuh dimensi untuk menganalisis *referent object* yang spesifik dalam konflik agama, seperti dimensi praktikal dan ritual, narasi dan mitos, emosional dan eksperimental, doktrinal dan dimensi-dimensi lainnya. Pendekatan lain yang ia tawarkan adalah pendekatan doktrinal yang memisahkan doktrin sebagai variabel independen yang dapat mencakup doktrin secara agama dan sekuler. Menurutnya, doktrin dapat diposisikan sebagai *referent object* karena banyak konflik yang berakar pada perbedaan doktrinal seperti Perang Dingin yang menjadi arena dari persaingan

intens antara ideologi komunisme dan kapitalisme. Akan tetapi pada konteks saat ini doktrin lebih dimaknai sebagai prinsip, nilai-nilai, atau ide-ide tertentu tentang cara hidup yang diterima sebagai otoritatif oleh sekelompok orang dan ditegakkan oleh mitos legendaris tertentu yang dengan mudah membuat doktrin layak mati sehingga ia tidak hanya mencakup doktrin agama, tetapi juga sekuler (Sheikh, 2014).

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1 Speech act

Speech act merupakan media yang memuat artikulasi ancaman di dalamnya. *Speech act* dipahami sebagai bentuk representasi yang tidak sekedar menggambarkan preferensi atau pandangan terhadap realitas eksternal (Williams, 2008). Menurut Austin dengan mengucapkan kata-kata maka, sesuatu dilakukan (Buzan et al., 1998).

1.6.1.2. Securitizing Actors

Securitizing actors adalah mereka yang melakukan *speech act* keamanan (Buzan et al., 1998). Mereka yang menjadi aktor sekuritisasi biasanya mempunyai legitimasi seperti pemimpin politik, birokrasi, pemerintah, pelobi dan kelompok penekan.

1.6.1.3. Functional Actors

Functional actors merupakan mereka yang memengaruhi dinamika suatu sektor. Aktor fungsional adalah mereka yang berada di luar pengambilan keputusan yang dapat memperkuat keputusan untuk melakukan sekuritisasi. Pada proses sekuritisasi, aktor fungsional berperan sebagai aktor yang secara signifikan memengaruhi keputusan di bidang keamanan (Buzan et al., 1998).

1.6.1.4. Referent Object

Referent object mengacu pada suatu hal yang terancam secara eksistensial dan memiliki klaim yang sah untuk bertahan hidup (Buzan et al., 1998).

1.6.1.5. Sektor Doktrinal

Doktrin dimaknai sebagai prinsip, nilai-nilai, atau ide-ide tertentu tentang cara hidup yang diterima sebagai otoritatif oleh sekelompok orang dan ditegakkan oleh mitos legendaris tertentu yang dengan mudah membuat doktrin layak mati. (Sheikh, 2014).

1.6.1.6. *Extraordinary Measures*

Extraordinary measures merujuk pada tindakan luar biasa yang digunakan untuk menangani ancaman eksistensial (Buzan et al., 1998).

1.6.1.7. Facilitating Conditions

Facilitating conditions merupakan kondisi di mana *speech act* berhasil diterima (Buzan et al., 1998).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1. *Speech Act*

Sebagaimana *speech act* yang merujuk media yang memuat artikulasi ancaman di dalamnya, dalam hal ini terdapat beberapa aktor yang melakukan pernyataan yang memuat ancaman di dalamnya. *Speech act* yang dianalisis dalam penelitian ini dikutip dari media-media Ukraina, pernyataan resmi Presiden di situs resmi pemerintah, dan pernyataan resmi Pemimpin OCU dalam situs resmi OCU.

1.6.2.2 *Securitizing Actors*

Dalam kasus ini aktor sekuritisasi merupakan mereka yang memiliki legitimasi dalam melakukan *speech act*. Penelitian ini memilih beberapa tokoh sebagai *securitizing actors* yang terdiri dari elit-elit pemerintah Ukraina dan juga

OCU. Secara rinci, elit-elit pemerintah yang dimaksud yakni , Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Ketua Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk beserta wakil-wakil rakyat, Mantan Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Oleksiy Danilov, Kepala Dinas Keamanan Ukraina, Vasyl Malyuk dan Primat Gereja Ortodoks Ukraina dan Seluruh Ukraina Metropolitan Epifanii. Pemilihan mereka didasarkan posisi mereka yang kredibel dan mampu dalam mengkonstruksikan UOC-MP sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan nasional.

1.6.2.3 Functional Actors

Dalam kasus ini aktor fungsional adalah mereka yang berada di luar mekanisme pengambilan keputusan, namun berperan penting dalam mendukung atau menghambat proses sekuritisasi. Pada penelitian ini, aktor fungsional yang ditetapkan adalah media massa, partai politik atau parlemen, dan aktor-aktor internasional seperti Gereja-Gereja di luar Ukraina, pemerintah Rusia, dan PBB.

1.6.2.3. Referent Object

Pada penelitian ini, terdapat dua *referent object* yang diteliti yaitu, keamanan nasional dan nilai independensi spiritual. Dari segi keamanan nasional, UOC-MP menunjukkan ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional karena disebut menjaga hubungan formalnya dengan ROC dan mendukung invasi skala penuh yang dilakukan pemerintah Rusia. Di sisi lain, posisi nilai independensi spiritual dalam *referent object* didasari karena indoktrinasi doktrin Dunia Rusia terhadap UOC-MP. Nilai ini juga dianggap menjadi ancaman eksistensial bagi keamanan nasional dan juga nilai independensi spiritual yang dibangun oleh Presiden Zelenskyy.

1.6.2.4. Sektor Doktrinal

Pada aspek ini, sektor doktrinal akan diletakkan dalam *referent object* sebagaimana disebutkan oleh Sheikh (2014) mengenai diposisikannya doktrin sebagai *referent object*. Di dalam proses sekuritisasi ini, nilai independensi spiritual

menjadi doktrin atau nilai yang menjadi objek referensi ketika ia diperhadapkan dengan doktrin Dunia Rusia. Doktrin independensi spiritual perlu dilindungi lantaran ia secara tidak langsung menjadi terancam akibat doktrin dunia Rusia yang dianggap sesat dan menjadi motor dari invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Doktrin ini dianggap menghancurkan Ukraina dan kemudian membatasi Ukraina dalam menentukan dirinya sendiri yang berarti juga membatasi kemerdekaannya. Doktrin ini juga disusupkan dalam aspek spiritual yang kemudian juga berdampak pada aspek keagamaan di Ukraina, terutama Ortodoksi sebagaimana doktrin ini didukung oleh Gereja Patriarkat Moskow. Doktrin ini jelas kontraproduktif dengan masyarakat Ukraina yang cenderung selalu mencoba mencapai kemerdekaan, termasuk secara spiritual. Hal ini kemudian mendorong pemosisian independensi spiritual sebagai objek yang terancam secara eksistensial sehingga perlu respon luar biasa untuk mengamankannya.

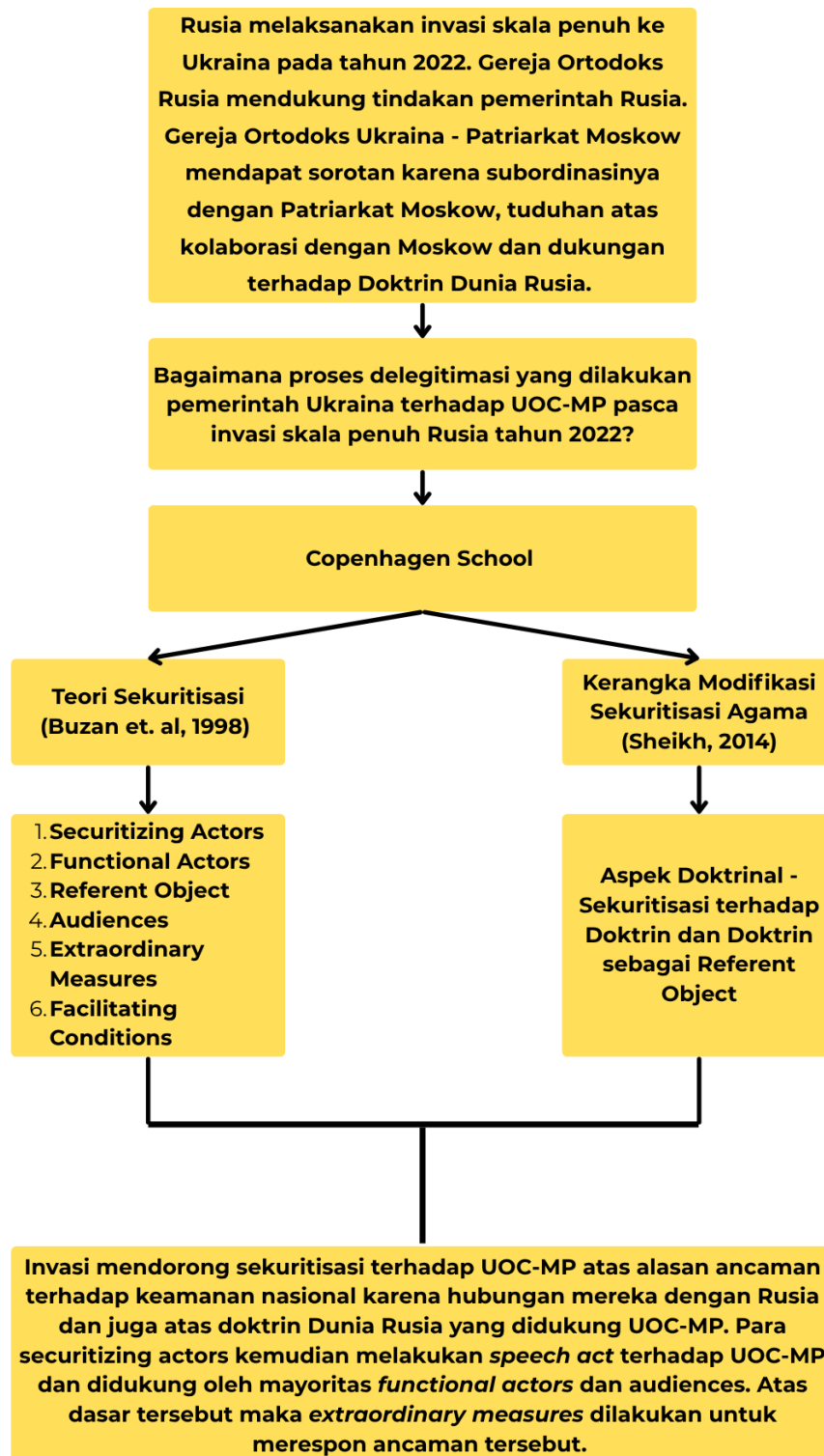
1.6.2.5. *Extraordinary Measures*

Di dalam merespon diskursus ancaman yang ditujukan terhadap UOC-MP, maka pemerintah Ukraina melakukan serangkaian tindakan luar biasa. Beberapa hal yang mereka lakukan untuk merespon ancaman tersebut adalah menerapkan sanksi terhadap pendeta-pendeta UOC-MP seperti terhadap Andrii Kovalenko, Vasyl Pvorozniuk, dan Oleksandr Prokopenko dan melakukan investigasi terhadap mereka, penangkapan beberapa pendeta-pendeta UOC-MP. Pemerintah juga melakukan pemindahan status Kyiv-Pechersk Lavra dari tangan UOC-MP ke pemerintah Ukraina karena dianggap melanggar kontrak dan status kepemilikannya berpindah tangan kepada negara. Terakhir yakni pengadopsian Undang-Undang '*On the Protection of the Constitutional Order in the Sphere of Religious Organisations*' nomor 3894 yang diadopsi pada 20 Agustus 2024 yang lalu. Secara sederhana, undang-undang ini melarang aktivitas ROC di Ukraina dan meregulasi organisasi keagamaan yang terafiliasi dengan ROC atau negara agresor.

1.6.2.6. *Facilitating Conditions*

Sebagai indikator keberhasilan penerimaan *speech act* terdapat tiga indikator yang menunjukkan keberhasilan proses tersebut yakni: 1) tuntutan internal terhadap tindak tutur untuk mengikuti tata bahasa keamanan, (2) kondisi sosial terkait posisi otoritas bagi aktor sekuritisasi-yaitu hubungan antara pembicara dan audiens dan dengan demikian kemungkinan audiens menerima klaim yang dibuat dalam upaya sekuritisasi, dan (3) fitur-fitur dugaan ancaman yang dapat memfasilitasi atau menghambat sekuritisasi (Buzan et al., 1998). Wæver kemudian menambahkan jika ada kondisi historis yang terkait dengan ancaman karena lebih mungkin bahwa seseorang dapat menyulap ancaman keamanan jika ada objek tertentu untuk merujuk yang umumnya dianggap mengancam, seperti misalkan tank, sentimen yang bermusuhan, atau perairan yang tercemar. Hal-hal ini tidak pernah membuat sekuritisasi yang diperlukan, tetapi mereka menyediakan kondisi yang memfasilitasi (Wæver dalam Kelstrup & Williams, 2000). Secara keseluruhan proses penerimaan *speech act* sukses lantaran pernyataan yang disampaikan oleh para tokoh menunjukkan *grammar of security* yakni identifikasi ancaman, urgensi untuk bertindak, dan tindakan luar biasa. Indikator kedua menunjukkan posisi aktor dan hubungannya dengan audiens. Para aktor memiliki posisi otoritas yang kuat terlebih sebagai presiden dan pemimpin agama. Hal ini menguatkan basis para aktor untuk menyampaikan narasi keamanan, dan penerimaannya ditunjukkan dengan jumlah pendukung narasi untuk menjamin independensi spiritual dengan melaran Gereja Moskow yang besar. Indikator ketiga juga menunjukkan proses penerimaan yang baik dari narasi keamanan, lantaran secara historis sejarah Rusia dengan Ukraina cukup kelam bagi Ukraina, sehingga muncul dorongan untuk menjadi negara merdeka dan lepas dari pengaruh Rusia. Hal ini menjadi basis yang kuat juga lantaran sejarah menunjukkan dasar yang kuat mengapa masyarakat harus menerima narasi keamanan yang sedang disampaikan, sehingga melalui tiga indikator tersebut, dapat disimpulkan jika proses penerimaan narasi berhasil.

Secara sederhana, penggunaan konsep-konsep di atas dalam penelitian ini dapat ditunjukkan melalui skema berikut:



Gambar 1.2 Alur berpikir penelitian

Sumber: diolah oleh penulis (2025)

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen jika proses delegitimasi yang dilakukan terhadap UOC-MP diawali dari konstruksi keamanan yang dibangun melalui *speech act*. *Speech act* yang disampaikan oleh para *securitizing actors* menunjukkan jika UOC-MP menjadi ancaman eksistensial bagi keamanan nasional Ukraina dan nilai independensi spiritual Ukraina karena UOC-MP bersubordinasi dan mendukung invasi Rusia serta mendukung dan menyebarkan doktrin Dunia Rusia. Hal ini mendorong seruan untuk melakukan tindakan segera dan tegas. Proses delegitimasi ini mendapat respon oleh *functional actors* yang meskipun ada yang menolak, namun secara umum proses sekuritisasi tetap berjalan karena penerimaan dari publik lebih unggul dari mereka yang menolaknya. Pemerintah Ukraina kemudian merespon ancaman keamanan ini dengan beberapa tindakan seperti pengambilalihan aset, penangkapan, penggeledahan, dan hukuman terhadap pendeta-pendeta UOC-MP yang melakukan pelanggaran hukum, sampai pada perumusan undang-undang nomor 3894 yang bertujuan melarang ROC, organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan negara agresor dan organisasi keagamaan yang mendukung doktrin Dunia Rusia. Secara umum proses sekuritisasi ini dapat disebut berhasil karena, kondisi yang memfasilitasinya: *grammar of security*, posisi otoritatif para aktor, dan sejarah yang mendukung, membantu penerimaan narasi dengan baik, sehingga proses penerimaan narasi dapat disimpulkan berhasil.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian. Secara definitif menurut King (dalam Bakry, 2016; 62) metode penelitian kualitatif merupakan teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai fenomena, aktivitas, proses sosial di mana penelitian ini akan lebih berfokus kepada makna dan pemahaman dibandingkan dengan kuantifikasi (Bakry, 2016;62). Sesuai dengan tujuannya, Creswell menuturkan bahwa penelitian kualitatif berusaha mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah

individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2013 dalam Bakry, 2016;14). Dalam proses penelitian, penelitian kualitatif akan melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dan peneliti selanjutnya menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh (Bakry, 2016;14). Alasan dari penggunaan metode penelitian kualitatif dalam tulisan ini adalah untuk dapat memahami argumen, data dan informasi dengan mendalam. Penggunaan konsep sekuritisasi dalam penelitian ini yang melibatkan *speech act* juga akan melibatkan analisis wacana yang memang menjadi bagian dari metode kualitatif sehingga nantinya diharapkan adanya pemahaman yang mendalam dan komprehensif lewat penggunaan metode penelitian yang kualitatif.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk dari penelitian deskriptif yang mencoba memberikan gambaran atas suatu fenomena atau subyek penelitian. Menurut Sukamdinata (2006; 72) penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah mau pun fenomena buatan manusia (Ikbar, 2014). Fenomena itu bisa berupa objek bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan fenomena satu dengan fenomena lainnya. Tipe penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu (Ikbar, 2014). Secara spesifik penelitian ini akan mendeskripsikan proses sekuritisasi oleh elit-elit Ukraina terhadap Gereja Ortodoks Ukraina (UOC-MP) yang menjadi dalih dari delegitimasi.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian berarti penempatan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini peneliti akan melakukan penelitian melalui *desk research* dengan mengumpulkan data dan sumber yang relevan terkait dengan penelitian. Penelitian akan menggunakan sumber-sumber fisik mau pun elektronik yang kredibel dan

relevan dengan penelitian yang dilakukan. Di dalam melakukan penelitian secara *desk research*, peneliti melakukannya di kota Semarang.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu dan/atau kelompok yang dapat memberitahukan sesuatu terkait dengan fenomena atau kasus yang diteliti. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah pemerintah Ukraina. Penelitian akan berfokus pada proses sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Ukraina sepanjang invasi Rusia pada tahun 2022 hingga tahun 2024.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif dengan bentuk teks, kata-kata tertulis, dan diperkuat dengan beberapa data-data kualitatif dalam bentuk numerik. Data-data ini akan dikumpulkan dengan metode *desk research* serta wawancara untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap peristiwa yang sedang diteliti.

1.8.5. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer akan didapatkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu S. Kosiachuk yang merupakan seorang mahasiswa berkebangsaan Ukraina di Kharkiv, dan Y. Shynkarenko yang merupakan *Charge d'affairs* Kedutaan Besar Republik Ukraina di Indonesia. Alasan penulis menetapkan narasumber ini adalah, karena Kosiachuk merupakan seorang mahasiswa di Kharkiv yang juga orang Ukraina asli sehingga yang bersangkutan dekat dengan masalah yang sedang terjadi di Ukraina, sementara Shynkarenko di samping orang Ukraina asli yang memahami kondisi di Ukraina, ia juga seorang diplomat yang memiliki akses yang lebih mendalam dan variatif mengenai isu yang sedang dibahas. Untuk data sekunder diperoleh lewat buku, jurnal, laporan, berita, dan sumber-sumber relevan lainnya. Kombinasi kedua sumber data akan dapat menawarkan pemahaman yang mendalam mengenai peristiwa yang sedang diteliti.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendukung kelengkapan data penelitian. Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama S. Kosiachuk, seorang mahasiswa di kota Kharkiv melalui *platform Google Meet* dan Y. Shynkarenko selaku *Charge d'affairs* Kedutaan Besar Ukraina di Indonesia melalui *platform Zoom Meeting*. Untuk data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan *online research*. Data sekunder yang digunakan dapat berupa hasil penelitian, buku, jurnal, dan sumber kredibel lainnya yang relevan dengan penelitian.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini melakukan analisis dan interpretasi data yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen 1982, dalam Moleong, 2007). Dengan demikian analisis data berfungsi untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Secara khusus penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* dalam menganalisis data. *Content analysis* merupakan pendekatan analisis dokumen dan teks yang tunduk pada proses penghitungan seperti frekuensi kata, frasa, dan perangkat linguistik tertentu (Bryman & Bell, 2011, 289).

Di sisi lain untuk menginterpretasikan data akan menggunakan pendekatan *critical discourse analysis* (CDA). Metode ini menganalisis hubungan dialektis antara wacana dan objek, elemen, atau momen lain, serta analisis 'hubungan internal' wacana (Fairclough, 2013). Analisis ini merupakan bentuk analisis transdisipliner dan berfokus pada dampak hubungan dialektis antara wacana dan kekuasaan, serta dampaknya terhadap hubungan lain dalam proses sosial dan elemen mereka (Fairclough, 2013). Menurut Fairclough (2013), analisis wacana

kritis memiliki beberapa karakteristik seperti; (i) bukan sekedar analisis wacana tetapi juga merupakan bagian dari beberapa bentuk analisis transdisipliner yang sistematis mengenai hubungan antara wacana dan elemen lain dari proses sosial, (ii) bukan sekedar komentar umum mengenai wacana, tetapi mencakup beberapa bentuk analisis sistematis terhadap teks, dan (iii) tidak sekedar deskriptif, tetapi juga normatif dalam artian membahas kesalahan sosial dari aspek diskursif dan kemungkinan cara untuk memperbaiki atau mengurangnya.

1.8.8. Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan data yang kredibel, berkualitas, dan otentik. Menurut Lincoln dan Guba (1985) penelitian yang berkualitas ditentukan melalui empat kriteria yaitu kredibilitas (hasil penelitian yang membantu memahami fenomena), transferabilitas (hasil penelitian yang dapat ditransfer pada konteks lain), dependabilitas (kriteria yang menunjukkan hasil yang sama pada kedua kalinya), dan konfirmabilitas (hasil penelitian yang dapat dikonfirmasi). Hasil penelitian yang berkualitas ini dapat ditunjang melalui kualitas data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari narasumber kredibel dan memiliki kapabilitas dalam topik penelitian ini. Di sisi lain, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui jurnal, buku, dan karya tulis lain dari sumber yang kredibel sehingga dari segi kualitas data, penelitian ini dapat menjamin penggunaan data yang kredibel dan berkualitas.